

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tabel Tinjauan Literatur

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Expert's take: Gender equality is critical for the Afghanistan's future	Davidian Alison	Fokus terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam konteks pembangunan dan perlindungan sosial.	Penelitian tersebut hanya berfokus perspektif global tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh wanita dan anak perempuan di Afghanistan
2.	Gender, Parenting and Practices in Child Welfare Social Work? A Comparative Study from England, Ireland, Norway and Sweden	Nygren, Karina Walsh, Julie C Ellingsen, Ingunn T Christie, Alastair	Fokus pada kesetaraan gender dalam konteks perlindungan anak, mengeksplorasi bagaimana gender mempengaruhi praktik pengasuhan dan pekerjaan sosial, serta pentingnya memperhatikan dinamika gender untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak.	Penelitian tersebut berfokus melakukan studi komparatif antara empat negara Eropa dan menyoroti bagaimana praktik pekerjaan sosial perlindungan anak dipengaruhi oleh kebijakan kesetaraan gender di negara-negara tersebut.
3.	Tackling Gender Inequality: Definitions, Trends, and Policy Designs	Shang Baoping	Meneliti tentang menyoroti pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender dan merancang kebijakan yang efektif untuk mencapai kesetaraan gender, yang merupakan prasyarat penting untuk perlindungan anak dan pembangunan sosial yang inklusif.	Penelitian tersebut berfokus untuk memberikan analisis yang lebih luas tentang definisi, tren, dan desain kebijakan yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender secara umum.
4.	Women in Afghanistan: Developments over the Last 20 Years and the Return of the Taliban	Albrecht Clara, Rude Britta, Stitteneder Tanja	Fokus pada situasi wanita dan anak perempuan di Afghanistan. Menyoroti perubahan yang terjadi selama dua dekade terakhir, termasuk dampak kembali berkuasanya Taliban terhadap hak-hak dan	Penelitian tersebut lebih fokus pada analisis historis dan kontemporer tentang kondisi wanita di Afghanistan, termasuk kemajuan dan tantangan yang dihadapi selama 20 tahun terakhir, serta implikasi dari kembali berkuasanya Taliban.

			perlindungan wanita dan anak perempuan.	
5.	Achieving Gender Equality in Afghanistan by 2020	Priya, Gunjan	Meneliti tentang pentingnya kesetaraan gender sebagai faktor kunci dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, serta dalam perlindungan dan pemberdayaan anak perempuan dan wanita.	Penelitian tersebut lebih fokus pada target dan strategi yang ditetapkan untuk mencapai kesetaraan gender di Afghanistan dalam kerangka waktu tertentu

2.2. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

Literatur pertama yaitu artikel yang berjudul "*Expert's take: Gender equality is critical for the Afghanistan's future*" Literatur ini menjelaskan bahwa memberikan argumen yang kuat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam perjalanan Afghanistan menuju pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan. Ditulis oleh Alison Davidian, Wakil Perwakilan UN Women di Afghanistan, artikel tersebut menguraikan perubahan drastis dalam kehidupan perempuan dan anak perempuan Afghanistan setelah pengambilalihan Kabul oleh Taliban pada tanggal 15 Agustus 2021. Davidian menekankan bahwa terlepas dari rasa takut dan ketidakpastian, advokasi dan perjuangan hak-hak perempuan Afghanistan memiliki sejarah yang panjang dan akan terus berlanjut. Artikel tersebut menyoroti tonggak penting yang dicapai oleh perempuan Afghanistan, seperti hak untuk memilih pada tahun 1919 dan pendirian sekolah pertama untuk anak perempuan pada tahun 1921, menggarisbawahi pentingnya partisipasi penuh dan kepemimpinan mereka dalam kehidupan publik dan politik. Lebih lanjut, artikel ini membahas tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan di bawah rezim baru, termasuk penghapusan Kementerian Urusan Perempuan dan serangan terhadap pusat-pusat perlindungan perempuan. Terlepas dari kemunduran ini, Davidian menegaskan kembali komitmen UN Women untuk mendukung perempuan dan anak perempuan Afghanistan dan menekankan perlunya

respons kemanusiaan yang peka gender terhadap krisis di negara tersebut. Tinjauan literatur dari artikel ini akan berfokus pada ketahanan dan perjuangan perempuan Afghanistan yang sedang berlangsung untuk mendapatkan kesetaraan dan peran penting dari dukungan internasional, termasuk dari entitas seperti Swedia, dalam memastikan kelanjutan dan perluasan hak-hak perempuan di Afghanistan.

Kedua, Artikel "*Gender, Parenting and Practices in Child Welfare Social Work? A Comparative Study from England, Ireland, Norway and Sweden*" memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana kesetaraan gender, kebijakan keluarga, dan praktik pekerjaan sosial kesejahteraan anak saling bersinggungan di empat konteks nasional yang berbeda. Studi yang dilakukan oleh Karina Nygren, Julie C Walsh, Ingunn T Ellingsen, dan Alastair Christie ini menggunakan data kelompok fokus yang dikumpulkan dari para pekerja sosial kesejahteraan anak di negara-negara tersebut. Penelitian ini mengkaji berbagai tingkat progresivitas dalam kebijakan keluarga dan dampaknya terhadap kesetaraan gender dalam pengasuhan anak. Secara khusus, penelitian ini menyoroti bahwa meskipun ada peningkatan dari waktu ke waktu karena perkembangan kebijakan, masih ada fokus yang besar pada ibu dalam keputusan praktik kesejahteraan anak, dan ayah sering kali tidak dilibatkan dalam pertimbangan ini. Analisis tematik yang diterapkan pada diskusi kelompok terarah mengungkapkan bahwa bias ini dipengaruhi oleh perspektif yang berpusat pada anak dan perspektif risiko berbasis gender, di mana ayah dianggap lebih berisiko terhadap anak daripada ibu. Wawasan unik ini menantang asumsi bahwa kesetaraan gender dalam pengasuhan anak sudah sepenuhnya terwujud dalam praktiknya, bahkan di negara-negara dengan kebijakan keluarga yang progresif seperti Swedia dan Norwegia. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pekerjaan sosial kesejahteraan anak untuk mengatasi bias gender implisit yang dapat memengaruhi keputusan praktik dan secara aktif melibatkan kedua orang tua dalam kesejahteraan anak, memastikan pendekatan pengasuhan yang lebih seimbang dan adil dalam konteks perlindungan anak.

Ketiga, Artikel "*Tackling Gender Inequality: Definitions, Trends, and Policy Designs*" oleh Baoping Shang menyajikan pandangan holistik tentang ketidaksetaraan

gender, yang membahas isu-isu utama dan implikasi kebijakan. Makalah ini membedakan antara ketidaksetaraan gender dan kesenjangan gender, dengan menekankan bahwa tidak semua kesenjangan gender mencerminkan ketidaksetaraan. Beberapa kesenjangan dapat terjadi karena preferensi atau keunggulan komparatif antara laki-laki dan perempuan, yang tidak memerlukan intervensi kebijakan. Perbedaan ini sangat penting untuk merancang kebijakan yang efektif yang menargetkan ketidaksetaraan yang sebenarnya, bukan hanya perbedaan alamiah dalam hal pilihan dan kemampuan. Shang juga membahas fokus ketidaksetaraan gender yang terus berkembang, dengan mencatat bahwa hal ini menjadi lebih halus dan implisit. Meskipun demikian, manfaat sosial dan ekonomi dari mengatasi ketidaksetaraan gender tetap besar. Makalah ini berargumen bahwa mengatasi ketidaksetaraan gender bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya perempuan, dan bahwa masyarakat secara keseluruhan harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Baik kebijakan umum maupun kebijakan gender yang ditargetkan dapat berperan dalam mengatasi ketidaksetaraan gender, namun seiring dengan semakin beragamnya nuansa yang ada, kebijakan yang ditargetkan kemungkinan besar akan semakin berperan.

Keempat, Artikel "*Women in Afghanistan: Developments over the Last 20 Years and the Return of the Taliban*" memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemajuan dan kemunduran dalam kesetaraan gender di Afghanistan. Para penulisnya, Clara Albrecht, Britta Rude, dan Tanja Stitteneder, merinci kemajuan yang telah dicapai sejak jatuhnya rezim pertama Taliban pada tahun 2001, dengan menyoroti peningkatan dalam partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, pendidikan, khususnya di pendidikan dasar, dan representasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, artikel tersebut juga mengakui adanya kesenjangan yang terus berlanjut dalam kesetaraan gender dan bahaya yang terus dihadapi oleh perempuan Afghanistan, yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Kembalinya Taliban pada pertengahan Agustus 2021 menimbulkan pertanyaan signifikan tentang masa depan perempuan dan anak perempuan Afghanistan. Artikel ini mengkaji potensi pembalikan dari kemajuan yang telah dicapai dalam kesetaraan gender selama dua dekade terakhir, dengan

mempertimbangkan perlakuan historis Taliban terhadap perempuan dan tindakan mereka baru-baru ini sejak mereka kembali berkuasa. Para penulis memberikan analisis kritis terhadap kondisi hak-hak perempuan yang rapuh di Afghanistan dan pentingnya dukungan internasional dalam menjaga kemajuan yang telah dicapai. Tinjauan literatur ini akan berfokus pada kontras antara kemajuan yang telah dicapai sejak tahun 2001 dan kemunduran yang dihadapi sejak kebangkitan Taliban. Ini adalah sebuah telaah kritis terhadap kondisi hak-hak perempuan di Afghanistan, pencapaian kesetaraan gender dalam beberapa tahun terakhir, dan potensi dampak kembalinya Taliban terhadap kemajuan-kemajuan ini. Artikel ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya kesetaraan gender di wilayah yang terkena dampak konflik dan perlunya kewaspadaan dan dukungan yang berkelanjutan dari komunitas internasional.

Kelima, Artikel "*Achieving Gender Equality in Afghanistan by 2020*" menyajikan analisis mendalam mengenai upaya dan tantangan dalam mempromosikan kesetaraan gender di Afghanistan. Artikel ini membahas berbagai dimensi ketidaksetaraan gender, termasuk akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan partisipasi di bidang politik dan ekonomi. Makalah ini menyoroti kemajuan yang telah dicapai sejak jatuhnya rezim Taliban pada tahun 2001, seperti peningkatan pendaftaran anak perempuan di sekolah dan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, tetapi juga mengakui adanya hambatan signifikan yang masih ada karena norma-norma budaya, masalah keamanan, dan kelemahan kelembagaan. Tinjauan literatur akan berfokus pada strategi yang direkomendasikan untuk memberdayakan perempuan, seperti meningkatkan pendidikan anak perempuan, menginvestasikan kembali kebijakan ekonomi yang menguntungkan perempuan, dan mengatasi struktur patriarki, termasuk dampak perang dan pengungsian terhadap kehidupan perempuan. Artikel ini menekankan perlunya pemerintah Afghanistan untuk bekerja dengan giat untuk mewujudkan emansipasi wanita, karena wanita terus diperlakukan sebagai anak di bawah umur dalam banyak aspek masyarakat Afghanistan. Sebagai kesimpulan, artikel "*Mencapai Kesetaraan Gender di Afghanistan pada tahun 2020*" memberikan gambaran yang komprehensif tentang keadaan kesetaraan gender di Afghanistan dan

upaya yang diperlukan untuk mencapainya. Artikel ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya kesetaraan gender bagi stabilitas dan pembangunan negara dan peran yang dimainkan oleh aktor domestik dan internasional dalam mendukung upaya-upaya ini. Tinjauan literatur ini akan menyoroti kebutuhan kritis untuk advokasi dan tindakan yang berkelanjutan untuk mempromosikan kesetaraan gender di Afghanistan, terutama dalam menghadapi konflik yang sedang berlangsung dan perubahan politik.

Berdasarkan dalam penjelasan beberapa literatur tersebut, penulis menjadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Karena kesamaan latar belakang pembahasan yang membahas bagaimana upaya Swedia dalam mendukung kesetaraan gender melalui kerjasama kemanusiaan di Afganistan?

2.3. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.3.1. Feminisme Konstruktivis

Menurut Mary Wollstonecraft, dalam bukunya yang berjudul "*A Vindication of the Rights of Woman*", berpendapat bahwa perempuan harus menerima pendidikan yang sama dengan laki-laki. Dia menekankan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk menjadi mitra yang setara dengan suami mereka, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Menurut Wollstonecraft, perempuan tidak secara alamiah lebih rendah dari laki-laki, tetapi tampak demikian hanya karena mereka kekurangan pendidikan. Dia berpendapat bahwa memperlakukan perempuan sebagai hiasan atau properti bagi laki-laki hanya akan melemahkan landasan moral masyarakat. Wollstonecraft juga menanggapi para ahli teori pendidikan dan politik pada masanya yang percaya bahwa perempuan tidak perlu menerima pendidikan rasional. Dia menyerukan bahwa pendidikan penting bagi perempuan sesuai dengan peran mereka dalam membesarkan anak dan posisinya dapat bertindak sebagai "pendamping" yang terhormat bagi suami mereka (Wollstonecraft, 2020).

Konstruktivisme feminis adalah teori dalam hubungan internasional yang berakar pada teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bagaimana ide-ide gender mempengaruhi politik global. Konstruktivisme sendiri adalah pendekatan epistemologis yang beranggapan bahwa manusia menciptakan pengetahuan dan makna melalui interaksi mereka dengan dunia dan pemikiran mereka. Dalam konteks ini, para konstruktivis percaya bahwa kehidupan internasional bersifat sosial, terbentuk melalui interaksi manusia satu sama lain. Meski ada kesamaan, konstruktivis feminis melihat hubungan kekuasaan dari sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan konstruktivis tradisional. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan dan gender merupakan “bagian tak terpisahkan dalam proses konstruksi,” sementara konstruktivis tradisional percaya bahwa kekuasaan bersifat eksternal. Konstruktivis feminis berpendapat bahwa tidak adanya penelitian problematisasi dalam proses sosial konstruksi justru tidak konsisten “dengan ontologi eksistensi”. Konstruktivis feminis juga meyakini bahwa perbedaan antara pria dan wanita, kecuali perbedaan anatomi, juga “dikonstruksi” karena sosialisasi dan kebiasaan budaya. Dengan kata lain, perbedaan gender bukanlah sesuatu yang inheren, tetapi lebih merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya. Dalam hal ini, konstruktivisme feminis memberikan pandangan baru dan penting dalam memahami dinamika gender dalam politik global (Rokhmansyah, 2016).

Dalam konteks ini, pemikiran Mary Wollstonecraft dan konstruktivisme feminis sangat relevan. Wollstonecraft berpendapat bahwa perempuan harus menerima pendidikan yang sama dengan laki-laki dan memiliki kapasitas untuk menjadi mitra yang setara dalam masyarakat (Wollstonecraft, 2020). Ini sejalan dengan misi SIDA dalam mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di Afghanistan.

Konstruktivisme feminis, yang menekankan bagaimana ide-ide gender mempengaruhi politik global, juga relevan dalam konteks kerja SIDA. SIDA menghargai hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan gender dalam misi mereka. Dengan demikian, SIDA berusaha untuk mengubah konstruksi sosial dan budaya yang telah menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan.

2.3.2. Kesetaraan Gender

Menurut J. Ann Tickner, kesetaraan gender bukan sekadar tentang pemberian perhatian terhadap perbedaan gender, melainkan sebuah konsep yang mendalam yang memasukkan analisis feminis ke dalam kajian hubungan internasional. Pendekatannya mengajak untuk mengevaluasi struktur kekuasaan, norma-norma sosial, dan asumsi-asumsi yang melandasi hubungan internasional dengan lensa gender. Tickner berpendapat bahwa kesetaraan gender tidak hanya menjadi isu keadilan sosial, melainkan juga menjadi dimensi krusial dalam memahami dan mengatasi tantangan keamanan global. Dalam perspektifnya, ketidaksetaraan gender menciptakan ketidakseimbangan dalam konstruksi keamanan, mengabaikan kontribusi perempuan, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan (Rosenberg & Tickner, 1993).

Selain itu, J. Ann Tickner menekankan pentingnya memasukkan suara perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan proses perdamaian. Menurutnya, partisipasi aktif perempuan bukan hanya hak asasi, tetapi juga strategi yang esensial untuk mencapai keamanan dan stabilitas. Tickner merinci bahwa pandangan unik perempuan, yang sering kali terpinggirkan, dapat memberikan kontribusi berharga dalam merancang kebijakan yang lebih holistik dan inklusif. Dengan menggali peran gender dalam struktur keamanan dan melihat kesetaraan sebagai landasan untuk mewujudkan keamanan global (Rosenberg & Tickner, 1993).

Berdasarkan teori kesetaraan gender, perempuan dan laki-laki seharusnya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hubungan internasional. Dalam hal ini, SIDA sebagai lembaga pembangunan internasional Swedia, berupaya untuk mempromosikan kesetaraan gender di Afghanistan dengan berbagai cara, termasuk melalui program-program yang ditujukan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Konsep-konsep dalam teori kesetaraan gender seperti hak asasi manusia, diskriminasi berbasis gender, dan pemberdayaan perempuan dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana program-program SIDA berkontribusi dalam mencapai kesetaraan gender di Afghanistan.

2.3.3. Official Development Assistant

Official Development Assistance (ODA) menempati peran sentral dalam konteks bantuan pembangunan internasional. Kerangka teoritis ODA dapat dimulai dengan teori pembangunan yang menekankan pentingnya bantuan luar negeri dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kondisi sosial di negara-negara berkembang. Teori ini mengasumsikan bahwa aliran dana dan sumber daya teknis dari donor dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, teori pertumbuhan ekonomi, seperti teori pertumbuhan endogen, dapat menjadi dasar untuk memahami bagaimana ODA dapat menjadi katalisator bagi pembangunan jangka panjang.

Sejumlah ahli memberikan pandangan mereka mengenai konsep ODA. R. M. Bird dan H. J. Sherman menyajikan konsep ODA sebagai aliran dana dari donor kepada penerima, yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan di negara penerima. Mereka menekankan perlunya memahami bagaimana aliran dana ini dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Selain itu,

Jeffrey D. Sachs, seorang ekonom pembangunan terkemuka, mengaitkan konsep ODA dengan upaya global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Menurutnya, ODA harus diarahkan pada inisiatif dan proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, kelaparan, dan ketidaksetaraan (Sachs, 2015).

Secara konseptual, ODA dapat dipahami sebagai bentuk dukungan finansial, teknis, dan kapasitas dari donor kepada negara penerima, dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial. Konsep ini melibatkan transfer sumber daya finansial, teknologi, dan pengetahuan untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Seiring perkembangan zaman, konsep ODA semakin mencakup aspek-aspek seperti tanggung jawab bersama, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat penerima. Oleh karena itu, kerangka konseptual ODA juga mencerminkan evolusi pemikiran dalam pembangunan internasional yang semakin menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam upaya mencapai hasil pembangunan yang holistic (Erdem Türkelli, 2020).

Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) erat kaitannya dengan teori dan konsep Official Development Assistance (ODA). ODA merujuk pada bantuan yang diberikan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sida, sebagai badan pemerintah Swedia yang bertanggung jawab atas bantuan pembangunan internasional, mengimplementasikan prinsip-prinsip ODA dalam kegiatannya.

Keterkaitan utama antara Sida dan ODA terletak pada tujuan dan metode pelaksanaan bantuan. Sida berkomitmen untuk memerangi kemiskinan, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan mendukung hak asasi manusia, selaras dengan tujuan ODA yang lebih luas.

Pendekatan SIDA dalam memberikan bantuan juga mencerminkan prinsip-prinsip ODA, seperti efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan. Sida memastikan bahwa dana bantuan digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan badan internasional untuk mencapai dampak yang maksimal. Melalui program-programnya, Sida mendukung berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pembangunan ekonomi, yang semuanya merupakan fokus utama dalam kerangka kerja ODA.

Dengan demikian, SIDA tidak hanya mengikuti panduan ODA dalam pelaksanaan bantuannya tetapi juga berkontribusi pada perkembangan dan peningkatan praktik-praktik terbaik dalam bidang bantuan pembangunan internasional, memperkuat keterkaitan antara kedua entitas ini.

2.4. Asumsi Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang beserta teori diatas, penulis menarik asumsi bahwa: “Strategi kerjasama kemanusiaan yang dilakukan Swedia melalui SIDA dalam mempromosikan kesetaraan gender dengan menanggapi dan menyesuaikan kondisi sosial budaya setempat, dapat menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di Afganistan”.

2.5. Kerangka Analisis

